



SKRIPSI

Judul:

Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur
Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan (Studi
Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Disusun oleh:

NUGRAHA BUDI RAHARJA
NIM. 205190077

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap
Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan
Kepailitan

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Nugraha Budi Raharja

NIM : 205190077

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Pengesahan

Nama : NUGRAHA BUDI RAHARJA
NIM : 205190077
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan (Studi Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
Title : Implementation of the Principle of Legal Balance Against Creditors in the Moratorium on Postponement of Debt Payment Obligation Agreements (PKPU) and Bankruptcy (Decision Study Number 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 19-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMA DA HUTABARAT, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Persetujuan

Nama : NUGRAHA BUDI RAHARJA
NIM : 205190077
Program Studi : HUKUM
Judul : Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan (Studi Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

- A. Nama : Nugraha Budi Raharja
- B. Judul Skripsi : Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan
- C. Halaman : vi + 76 halaman + 2 Daftar Pustaka + Lampiran + 2023
- D. Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, Moratorium
- E. Isi :

Salah satunya dampaknya pandemi Covid 19 ialah terganggunya kestabilan ekonomi mengakibatkan meningkatnya kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan diajukan pada Pengadilan Niaga, salah satunya Putusan No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi Pemohon dan PT Pan Brothers Tbk sebagai Termohon. Amar dari putusan tersebut menolak permohonannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pertimbangan PT Pan Brothers sudah memiliki moratorium pada Pengadilan Tinggi Singapura. Putusan tersebut dianggap tidak bisa membagikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebab Indonesia sebagai negara berdaulat tidak wajib untuk tunduk pada putusan negara lain. Tujuan penelitiannya agar mengetahui penerapan asas keseimbangan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam moratorium perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit Indonesia. Teknik penelitian ialah hukum normative, pendekatan UU. Sumbernya dari bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum. Setelah ditelaah, hasil penelitian menemukan pemberlakuan moratorium terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit secara merata tidak mencerminkan asas keseimbangan dan asas keadilan terhadap perlindungan hak kreditur karena debitur yang sebenarnya tidak membutuhkan moratorium pun atau yang beritikad tidak baik akan ikut mendapatkan manfaat dari pemberlakuan moratorium. Disarankan agar pemerintah dapat melakukan perubahan ketentuan terhadap UU No. 37 Tahun 2004 terkait Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk mengisi kekosongan hukum guna mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Acuan : 34 (1990-2023)
- F. Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- G. Penulis : Nugraha Budi Raharja

ABSTRACT

- A. Name : Nugraha Budi Raharja
- B. Title : *Debt Postponement Financing Liabilities and Insolvency filed with the Commercial Court*
- C. Pages : vi + 88 Page + 2 Table of Content + Extras + 2023
- D. Key Word : *Postponement of debt payment obligations, bankruptcy, moratorium*
- E. Contents :

The disruption is one of the effects of the COVID-19 pandemic of economic stability which has resulted in an increase in cases of Debt Postponement Financing Liabilities and Insolvency filed with the Commercial Court, one of which is Decision No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. namely between PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the Petitioner and PT Pan Brothers Tbk as the Respondent. The verdict rejected the request for postponement of debt financing duties on the consideration that PT Pan Brothers already had a moratorium from the Singapore High Court. The decision is considered unable to share legal certainty and legal protection because Indonesia as a sovereign state is not obliged to submit to the decisions of other countries. The aim of the study is to find out the application of the principle of balance to the legal protection of consumers in the moratorium agreement on the Debt Payment Obligations Postponed and Bankruptcy in Indonesia. The research technique is normative law, legal approach. The sources are primary, secondary, and non-legal materials. After being examined, the research found that the implementation of the moratorium on Postponement of Debt Payment Obligations and Bankruptcy evenly does not reflect the principle of balance and justice towards the protection of creditor rights because debtors who actually do not need a moratorium or who have bad faith will also benefit from the moratorium. It is suggested that the government can amend the provisions of Law No. 37 of 2004 related to Bankruptcy and the Waiver of Debt Payment Responsibilities, to fill the legal vacuum to overcome economic problems in Indonesia, especially regarding the provisions of Suspension of Debt Payment Requirements.

Reference : 34 (1990-2023)
- F. Adviser : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- G. Author : Nugraha Budi Raharja

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan (Studi Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaria Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Christine S.T. Kansil S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan;

8. Keluarga kandung penulis, Bapak Hadi Wijaya dan Ibu Avelina Bunga, dan Kaisar Yuwana Pangestu, S.Kom., S.Ak. yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam segala hal termasuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Pranata Rahajie Putranto, S.H., M.H., selaku Pengacara (Partner) dalam firma hukum Hendra Yudhy Nasution & Partners yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi guna menyelesaikan skripsi ini;
10. Orang-orang terdekat penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Andita Putri Nabila, Tiffany Dumais, Gerald Harsono, Kak Alifah Putri, Bang Dani, Andrew Reinard, Fernando Tju, Kak Vannesia, Recky Yachob Pardosi, S.H.
11. Semua rekan-rekan dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang mengatur tentang Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, tentunya masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis meminta maaf atas kesalahan yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi dengan tujuan pengembangan ke arah yang lebih baik

HALAMAN PERNYATAAN

Pernyataan

Nama : NUGRAHA BUDI RAHARJA
NIM : 205190077
Program Studi : HUKUM
Judul : Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan (Studi Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2023
Yang menyatakan



NUGRAHA BUDI RAHARJA
NIM. 205190077

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	Error! Bookmark not defined.
COVER DALAM	iError! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.v
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.x
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiError! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	14
A. Teori Perlindungan Hukum.....	15
B. Teori Kepastian Hukum.....	17
C. Teori Keadilan.....	20
D. Tinjauan Umum tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
22	
E. Tinjauan Umum tentang Moratorium	36
F. Tinjauan Umum tentang Asas Keseimbangan.....	36
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	40
A. Profil Pemohon	40
B. Profil Termohon.....	40

C. Uraian Kasus Posisi	40
D. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat	43
E. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura	48
F. Dasar Hukum Pengakuan Putusan Negara Asing di Indonesia	50
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 3: Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya

Lampiran 5: Surat Penerimaan Jurnal

Lampiran 6: Halaman Depan Jurnal

Lampiran 7: Surat Permohonan Wawancara Bapak Pranata Rahajie Putranto, S.H.,
M.H. Sebagai Pengacara (Partners) dalam Hendra Yudhy Nasution
& Partners

Lampiran 8: Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst